

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek Penanganan Longsor Nakau – Batas Kota Kepahiang dikerjakan oleh PT. Lestari Sarana Mandiri Bengkulu pada tahun 2022 berada pada ruas jalan nasional yang melewati kabupaten benteng dan kabupaten kepahiang sepanjang ± 60 km dengan sembilan titik penganan longsor.

Dari sembilan titik penanganan Longsor terdapat empat titik terletak di kawasan hutan lindung di bawah pengawasan dinas Lingkungan Hidup dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan wilayah kabupaten Bengkulu Tengah.

PT. Lestari Sarana Mandiri Bengkulu sebagai Kontraktor pelaksana bekerja dengan kontrak bulan Juli s.d Desember tahun 2022, dalam pekerjaan ini melibatkan kosultan pengawas sebagai pengontrol sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan standar teknis terkait aspek sumber daya manusia, Peralatan, material, keselamatan dan kesehatan kerja serta dampak lingkungan mejamin ketepatan mutu, waktu, biaya.

Manajemen pekerjaan secara fisik dan adminisrsi diperlukan sumber daya yang berpengalaman mengeri standar operasional prosedur (SOP) pada setiap tahapan dalam tujuan kepentingan mendapatkan profit pada perusahaan sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dalam menciptakan dunia kerja yang sehat dan bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Pekerjaan layanan jasa kontraktor pada pekerjaan Penanganan Longsor Nakau – Batas Kota Kepahiang Provinsi Bengkulu adalah :

1. Mewujudkan pelaksanaan pekerjaan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Pelaksanaan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Bengkulu berdasarkan kontrak kerja.
2. Mewujudkan pelayanan terbaik sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP) Kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) c.q Pejabat Pembuat Komitmen pelaksanaan 1.3 Jalan Nasional.
3. Mewujudkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak dan menjalankan RKK Pelaksanaan sesuai dokumen yang disampaikan.
4. Mewujudkan pekerjaan tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu.
5. Mewujudkan tenaga kerja yang profesional di bidang dunia konstruksi.

1.2.2 Manfaat

Adapun manfaat pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Penanganan Longsor Nakau – Batas Kota Kepahiang dapat memperlancar lalu lintas Jalan nasional menghubungkan antar provinsi yaitu provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.
2. Pembangunan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas.
3. Pembangunan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas yang berkeadilan sehingga Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.
4. Memperlancar serta membuka hubungan perekonomian daerah Simpang Nakau – Batas Kota Kepahiang.
5. Pembangunan berdampak pada pengaplikasian berbagai bidang ilmu yang menambah ilmu lapangan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat.

1.3 Batasan Masalah

Laporan ini membahas tentang langka-langka penanganan Proyek Penanganan Longsoran Nakau – Batas Kota Kepahiang berdasarkan kontrak awal dan kontrak addendum serta addendum final dengan item pekerjaan tertuang dalam kontrak yang direalisasi di lapangan oleh kontraktor pelaksana dan melibatkan pihak perencanaan, pengawasan dan instansi terkait dan masyarakat.

Pada laporan ini membahas terkait dengan metode imperis proses penanganan pekerjaan, kelengkapan administrasi dan teknis pekerjaan dilapangan dimulai dari penanda tanganan kontrak awal, PCM, Titik Nol, Rapat lapanan, mobilisasi kontrak perubahan/contract change order (CCO) serta kontrak addendum Final , PHO, FHO, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta dan. Masyarakat

1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan teknik ini yaitu :

1.4.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer yaitu data-data yang dikumpulkan dengan melakukan pengamatan dan pengambilan data langsung di lapangan. Pengumpulan data primer yaitu berupa :

- a. Melakukan observasi atau tinjauan langsung perkerjaan secara rutin terhadap tahapan pelaksanaan pekerjaan Penanganan Longsoran Nakau – Batas Kota Kepahiang.
- b. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap Pelaksana Pekerjaan - pekerjaan yang sedang berlangsung kepada pelaksana pekerjaan di lapangan khususnya tentang pekerjaan Penanganan Longsoran Nakau – Batas Kota Kepahiang. mulai dari persiapan tenaga, alat, material.
- c. Data lapangan seperti foto situasi pelaksanaan pekerjaan mulai dari melakukan pengukuran secara langsung, sistem kerja alat berat, hingga proses pelaksanaan pekerjaan Penanganan Longsoran Nakau – Batas Kota Kepahiang..

1.4.2 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data pendukung Kontraktor Pelaksana berupa data profil gambar teknis proyek.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar laporan Teknik kerja di lapangan ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini sebagai berikut :

1.5.1 PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini membahas latar belakang dari proyek Paket Pekerjaan Pekerjaan Penanganan Longsoran Nakau – Batas Kota Kepahiang, yang disertai juga dengan maksud dan tujuan, Batasan Masalah, metode pengumpulan data penulisan serta sistematika penulisan.

1.5.2 GAMBARAN UMUM PROYEK

Informasi tentang proyek yang diperoleh dari hasil kompilasi dokumen – dokumen proyek yang diperoleh saat proyek sedang berjalan yang dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan pada bab ini, berupa dokumen kontrak, lelang, gambar kerja, spesifikasi teknis, laporan harian, mingguan, bulanan serta risalah – risalah rapat proyek. Unsur – unsur pelaksanaan proyek sebaiknya dijelaskan dengan bantuan struktur organisasi yang menunjukkan keterkaitan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan masing – masing.

1.5.3 TINJAUAN UMUM PROYEK

Pembahasan mengenai Jalan, jenis Jalan, Longsoran dan komponennya, jenis alat-alat yang digunakan dan fungsinya serta bahan yang dibutuhkan di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan proyek berlangsung di lapangan.

1.5.4 TINJAUAN KHUSUS PROYEK

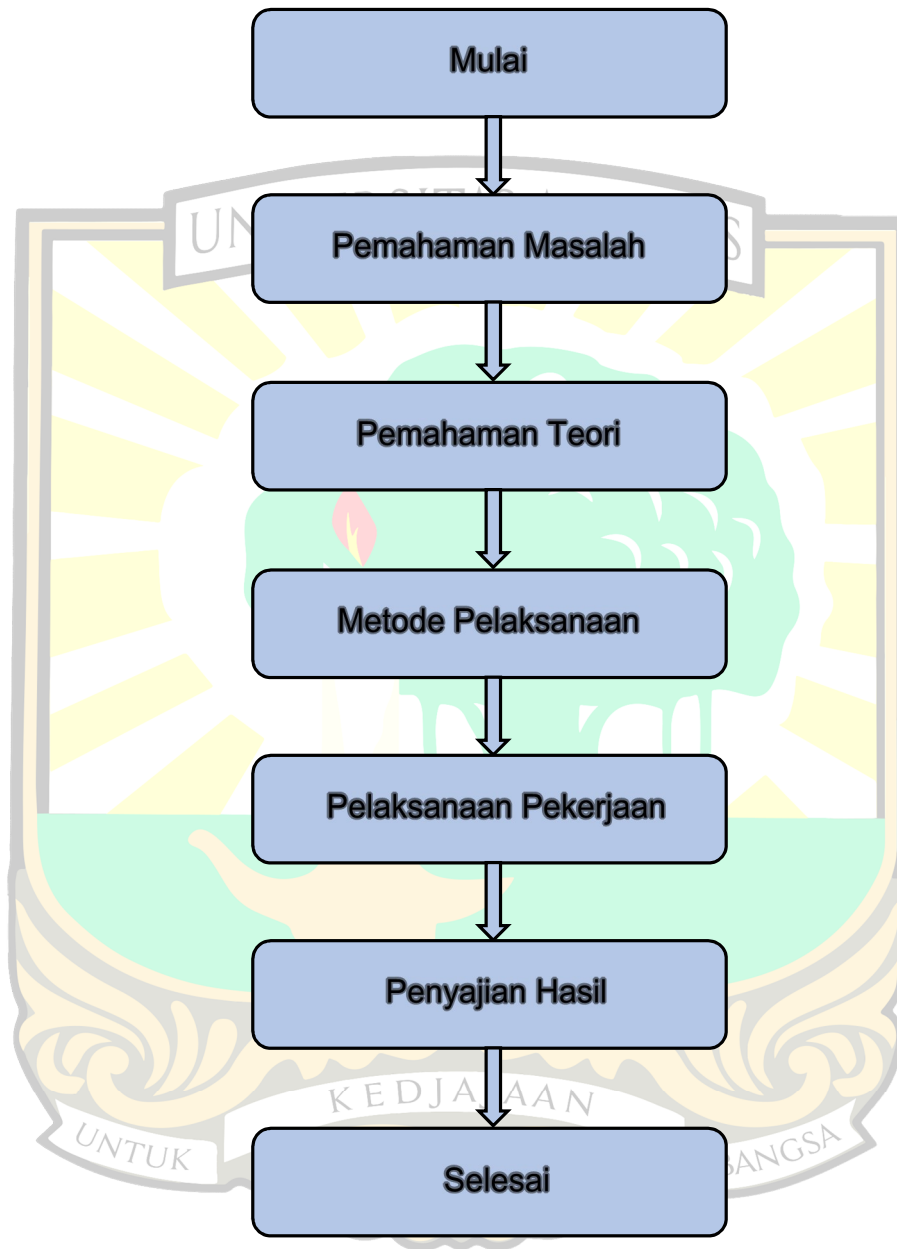
Bab ini berisi pembahasan tinjauan mengenai metode pelaksanaan pekerjaan Jalan tiang pancang di lapangan selama masa mengikuti pekerjaan dalam pelaksanaan .

1.5.5 PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan akhir dari pelaksanaan pekerjaan proyek yang telah Dikerjakan dan saran-saran yang disampaikan penulis.



1.6 Bagan Alur Penulisan



Gambar 1.1 Bagan Alur Penulisan

**Gambar 2.3 Peta Proyek Penangunan
longsoran Sp Nakau – Batas Kota
Kepahiang**
**Gambar 3.1 Bagan Alur
Penulisan**

BAB II

GAMBARAN UMUM PROYEK

2.1 Sejarah Proyek

Penanganan jalan nasional di propinsi Bengkulu merupakan tanggung jawab pihak Balai Pelaksanaan Jalan nasional yang menjamin jalan ini tetap operasi sehingga jalur transportasi ini harus di rawat setiap saat. Potensi kerusakan akibat beban, bencana gempa dan banjir aspek utama menjadi fokus perbaikan.

Terjadinya longsoran pada ruas jalan Simpang Nakau-Batas Kepahiang beberapa tahun sebelumnya telah dilakukan detail engineering desain, kemudian berdasarkan hasil desain tersebut pihak PPK pelaksanaan melakukan Proses tender.

Pemenang Terder adalah PT. Lestari Sarana Mandiri, kemudian dibuat Kontrak kerja PPK 2.1 PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dengan PT. Lestari Sarana Mandiri Bengkulu dengan kontrak nomor : HK.02.01/Bb25/SATKER PJN.I/PPK1.3/464, 08 Juli 2022, Kontraktor pelaksanaan Penanganan Longsoran – Batas Kota Kepahiang.

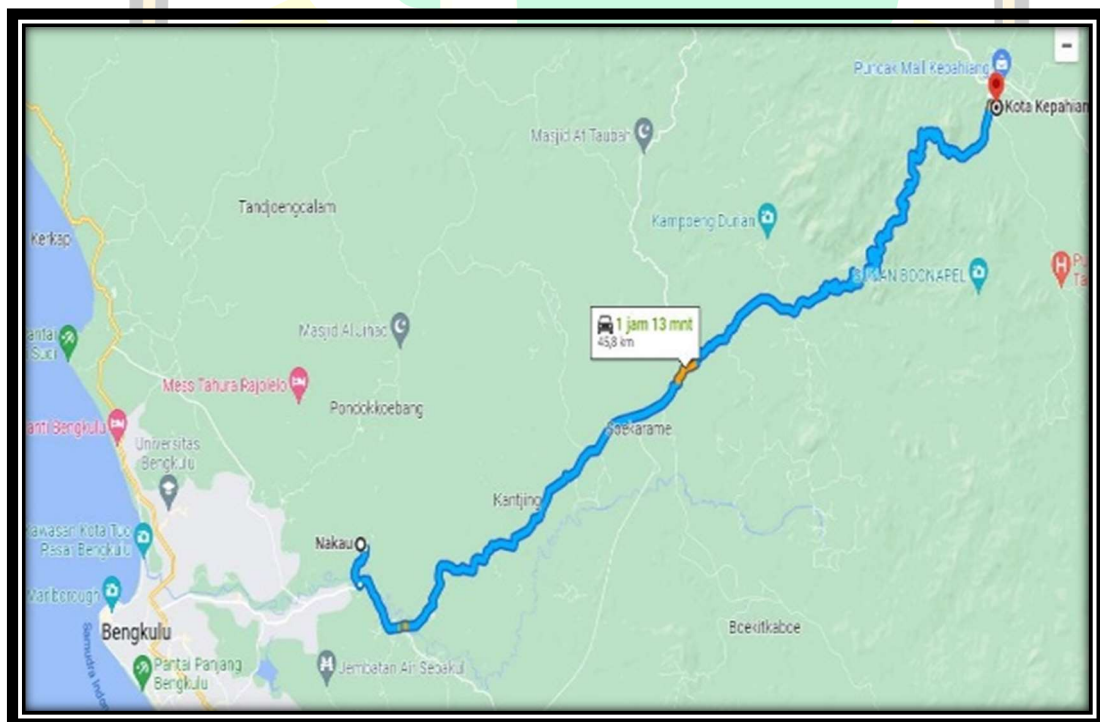
Pekerjaan ini diawasi oleh pihak pengawas Pekerjaan Jalan Nasional, Konsultan pengawas adalah PT. PT. Arista Cipta KSO PT. Laras Sembada KSO PT. Gading Perunacitra Engineering agar Kontraktor pelaksana dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada bertujuan agar proyek dapat selesai dengan tepat mutu, biaya dan waktu.

Program Peningkatan Paket Pekerjaan konstruksi Rekonstruksi Jalan Simpang Nakau-Batas kepahiang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan tingkat pelayanan jalan nasional, menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas serta memperlancar angkutan barang/jasa. Pelaksana kegiatan dibiayai dengan sumber dana APBN murni dengan sistem tahun tunggal Single year construction (SYC). Proyek peningkatan struktur Jalan yang dikerjakan adalah Paket Pembangunan Pekerjaan konstruksi penanganan longsoran Simpang Nakau-Batas kepahiang. Dalam pelaksanaan ini akan lebih kami fokuskan pada pekerjaan Longsoran.

2.2 Data Umum Proyek

1. Nama Paket : Penanganan Longsoran Nakau – Bts. Kota Kepahiang
2. Sumber Dana : APBN Murni
3. Lokasi : Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepahiang
4. Nomor Kontrak : HK.02.01/Bb25/SATKER PJN.I/PPK1.3/464
5. Tanggal Kontrak : 08 Juli 2022
6. Nilai Kontrak : Rp. 26.107.327.000,00
7. Waktu Pelaksanaan : 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kalender
8. Waktu Pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
9. Kontraktor Pelaksanaan : PT. Lestari Sarana Mandiri Bengkulu
10. Konsultan Supervisi : PT. Arista Cipta KSO PT. Laras Sembada KSO PT. Gading Perunacitra Engineering

2.3 Peta Lokasi Proyek

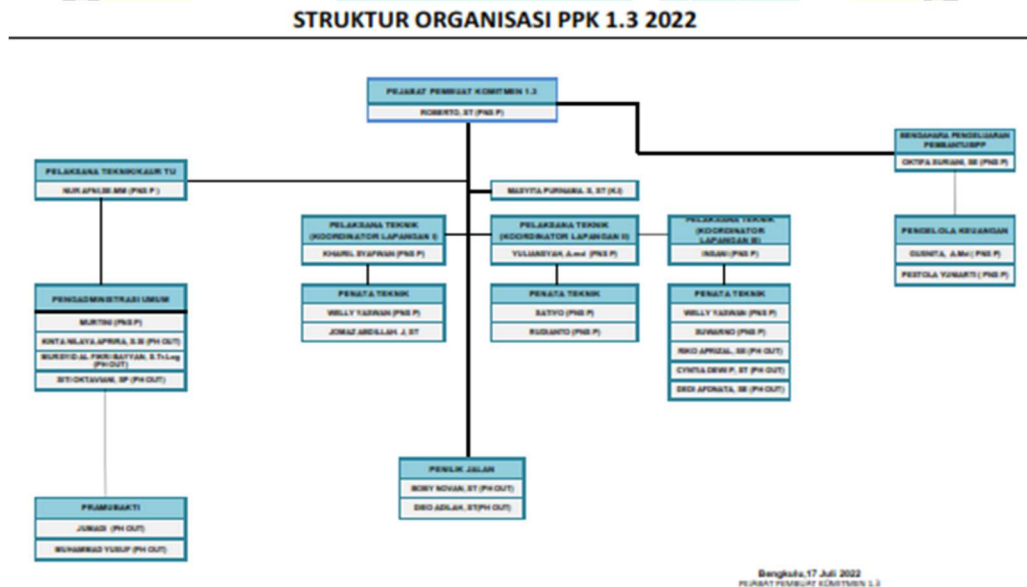


Gambar 4.3 Peta Proyek

2.4 Struktur Organisasi Proyek

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan kerja yang menggambarkan satu kesatuan kerja secara keseluruhan dalam suatu proyek. Dalam pembagian pekerjaan haruslah tepat dalam mencari kriteria untuk posisi yang akan di tempati. Adapun tujuan dari organisasi adalah menciptakan serangkaian hubungan dalam sebuah sistem kerjasama antar kelompok atau masing – masing orang di dalam organisasi tersebut maupun dari pihak luar. Hal ini akan tercipta apabila para pihak yang terlibat dalam organisasi mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing – masing.

Untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan maka sistem organisasi harus baik dan terlihat.



Gambar 2.4.1 *Gambar 5 Gambar 3.5 Excavator Or Gambar 3.6 Tandem Roller* organisasi PPK 1.3

jelas dan wewenang serta tanggung jawab dari semua personil yang terlibat, dan yang tak kalah pentingnya yaitu adanya komunikasi yang baik dan lancar dari semua pihak yang ada dalam alur organisasi tersebut

2.4.1 Organisasi Pemilik Proyek

Pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah pihak yang memiliki pemikiran awal dalam merencanakan proyek, sekaligus yang menanggung pembiayaan proyek yang akan didirikan. Umumnya pemikiran awal ini masih berupa gambaran kasar. Pemilik proyek adalah Pemerintah Pusat melalui kementerian Pekerjaan Umum Bidang Balai Pengelolaan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu yang akan mendirikan suatu bangunan sesuai dengan kemampuan dana yang dimilikinya baik yang melaksanakan sendiri secara swakelola maupun dikarenakan suatu alasan tertentu sehingga pekerjaan tersebut harus dikerjakan oleh orang/pihak lain yang memiliki kemampuan dibidangnya.

Hak dan kewajiban pengguna jasa adalah :

- a. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor)
- b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa.
- c. Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan.
- d. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan.
- e. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi)
- f. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan.
- g. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik.

Wewenang pemberi tugas adalah :

- a. Memberitahukan hasil lelang secara teknis kepada masing – masing kontraktor
- b. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal – hal diluar kontrak yang ditetapkan.

Pemilik proyek pada proyek Penanganan Longsoran Nakau – Batas Kota Kepahiang pengguna jasa adalah Departemen Pekerjaan Umum Bina Marga Balai Pembangunan Jalan Nasional.

Adapun jabatan dan fungsi unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga PPK 1.3 adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Proyek Pimpinan proyek dalam hal ini pimpinan PPK 1.3 adalah orang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan kegiatan proyek, mempunyai hak, wewenang, fungsi serta bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang dipimpinnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tugas pimpinan proyek sebagai berikut :

1. Mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan pembangunan proyek.
2. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan surat perjanjian (kontrak) antara pimpinan proyek dengan kontraktor.
3. Mengesahkan semua dokumen pembayaran kepada kontraktor.
4. Menyetujui atau menolak pekerjaan tambah kurang. Menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan. Memberikan semua instruksi kepada konsultan supervisi.

- b. Bendahara adalah orang yang bertanggung jawab kepada pimpinan proyek atas pengaturan pembiayaan sesuai dengan biaya kontrak pada proyek tersebut. Tugas Bendahara pengeluaran pembantu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan data – data kearsipan yang berhubungan dengan bukti – bukti pembukuan keuangan selama pelaksanaan proyek.
2. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan proyek.
3. Melaksanakan pembayaran dan persetujuan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP).

- c. Pelaksanaan administrasi

Peran administrasi proyek dimulai dari masa persiapan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pemeliharaan dan penutupan kontrak kerja.

Tugas pelaksana administrasi sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja diproyek untuk pegawai bulanan sampai dengan pekerja harian dengan spesialisasi keahlian masing – masing sesuai posisi organisasi proyek yang dibutuhkan.
 2. Pembuatan laporan keuangan atau laporan kas bank proyek, laporan pergudangan, laporan bobot prestasi proyek, daftar hutang dan lain- lain.
 3. Membuat dan melakukan verifikasi bukti-bukti pekerjaab yang akan dibayar oleh owner sebagai pemilik proyek.
 4. Melayani tamu – tamu internal perusahaan mapun eksternal dan melakkan tugas umum.
 5. Membuat laporan akutansi proyek dan menyelesaikan perpajakan.
 6. Mengurus tagihan kepada pemilik proyek atau jika kontraktor nasional dengan banyak proyek maka bertugas juga membuat laporan ke kantor pusat serta menyiapkan dokumen untuk permintaan dana ke bagian keuangan pusat..
 7. Membantu project manager Membuat laporan ke pemerintah daerah setempat, lurah atau kepolisian mengenai keberadaan proyek dan karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
 8. Memncatat aktivitas proyek meliputi intervensi, kendaraan dinas, alat- alat proyek dan sejenisnya.
 9. Menerima dan memproses tagihan dari sub kontraktor jika proyek yang dikerjakan berskala besar sehingga melakukan pemborongan kembali kepada kontraktor spesialis sesuai dengan item pekerjaan yang dikerjakan.
 10. Memelihara bukti – bukti kerja sub bagian administrasi proyek serta data – data proyek.
- d. Verifikator data dan informasi
- Verifikator data dan informasi bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran pembantu atas verifikasi data dan informasi yang telah dikerjakan

- e. Urusan pelaporan (petugas LPJ)
- Urusan pelaporan adalah petugas laporan bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran pembantu atas verifikasi data dan informasi yang telah dikerjakan.
- f. Pelaksanaan teknik dan umum Pelaksanaan teknik dan umum bertugas sebagai jabatan fungsional tertentu dan pelaporan serta bertanggung jawab kepada pelaksanaan administrasi.
- g. Administrasi teknik
- Administrasi teknik bertugas mengurus urusan sub bagian administrasi teknik dan pelaporan serta bertanggung jawab kepada pelaksanaan administrasi.
- h. Pelaksana teknik
- Pelaksana teknik pada paket 1.3 terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu pelaksanaan teknik pada pekerjaan rutin kondisi, biasa, dan holding dan juga pelaksanaan teknik pada pekerjaan rehab mayor, minor, dan rekonstruksi.
- Tugas pelaksanaan teknik secara umum antara lain :
1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja, metode kerja, gambar kerja, dan spesifikasi pekerjaan.
 2. Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja dilapangan.
 3. Menjaga kebersihan dan ketertiban dilapangan.
 4. Mengontrol setiap kebutuhan proyek yang akan dilaporkan kepada manajer proyek.
 5. Pelaksanaan pemeliharaan Pelaksanaan pemeliharaan bertugas mengontrol, mengawasi serta memelihara pekerjaannya sesuai pembagian tugas, pelaksanaan pemeliharaan juga bertanggung jawab langsung kepada masing - masing.

2.4.2 Organisasi Kontraktor Pelaksana

Kontraktor Pelaksana adalah orang/badan yang melaksanakan pekerjaan bangunan secara lengkap baik dibidang Kontraktor, sipil, dan bidang lain yang melekat erat membentuk sebuah sistem bangunan. Kontraktor pelaksana bertugas untuk melaksanakan pekerjaan proyek secara detail, *bill of material* (rincian material yang akan digunakan), jadwal pekerjaan sampai memperkirakan detail waktu yang akan dilaksanakan , dan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan .

Hak dan kewajiban Kontraktor adalah :

- a. Membuat Schedule Pelaksanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar pelaksanaan, rencana kerja dan Mobilisasi Peralatan dan SDM , menghitung ulang struktur, sesuai Mc 0 (Nol) Sesuai anggaran biaya.
- b. Memberikan usulan kepada pengguna jasa dan melalui Konsultan pengawas tentang pelaksanaan pekerjaan.
- c. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada Konsultan Supervisi tentang hal – hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat – syarat.
- d. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan.
- e. Menghadiri rapat koordinasi pengolaan proyek.
- f. Kontraktor yang telah dipilih oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Satker pelaksanaan Jalan di Paket ini adalah PT. LESTARI SARANA MANDIRI BENGKULU. Sebakagi kontraktor pelaksana melalui penetapan kontrak nomor HK.02.01/Bb25/SATKER PJN.I/PPK1.3/464 tanggal 8 Juli 2022 pada Paket Pekerjaan konstruksi Penanganan Longsorak Nakau – Batas Kota Kepahiang.